

Globalisasi 2.0: Peluang Emas atau **Ancaman Baru?**



Rudy C Tarumingkeng

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

3 April 2026

GLOBALISASI 2.0: PELUANG EMAS ATAU ANCAMAN BARU?

Abstrak

Makalah ini membahas "Globalisasi 2.0" sebagai istilah analitis untuk menggambarkan fase baru globalisasi yang tidak lagi terutama ditopang oleh perdagangan barang, relokasi manufaktur, dan liberalisasi modal seperti pada gelombang sebelumnya, melainkan semakin digerakkan oleh jasa, data, platform digital, komputasi, standar, dan kecerdasan buatan. IMF memproyeksikan pertumbuhan global sebesar 3,3% pada 2026 dan 3,2% pada 2027, sementara WTO mencatat bahwa volume perdagangan barang dunia tumbuh 4,6% pada 2025 tetapi diperkirakan melambat menjadi 1,9% pada 2026. Pada saat yang sama, WTO melaporkan nilai perdagangan jasa dunia mencapai US\$9,56 triliun pada 2025, dengan jasa yang disampaikan secara digital mencapai US\$5,26 triliun. Angka-angka ini menunjukkan bahwa ekonomi global tetap terhubung, tetapi struktur keterhubungan dan sumber nilai tambahnya telah berubah secara mendasar. ([IMF](#))

Makalah ini berargumen bahwa Globalisasi 2.0 membawa peluang emas sekaligus ancaman baru. Peluang emas muncul karena digitalisasi menurunkan sebagian biaya partisipasi lintas batas, memperluas perdagangan jasa, mempercepat difusi pengetahuan, dan membuka kemungkinan bagi negara berkembang, perusahaan kecil, serta pekerja profesional untuk masuk ke jaringan ekonomi global dengan cara yang

sebelumnya sulit dilakukan. OECD menegaskan bahwa teknologi digital mengubah apa yang diperdagangkan, bagaimana perdagangan berlangsung, dan siapa yang dapat ikut serta, sedangkan WTO dalam *World Trade Report 2025* menyatakan bahwa AI dapat menurunkan biaya perdagangan, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses pasar. ([OECD](#))

Namun peluang tersebut tidak tersebar otomatis. Ancaman baru muncul dalam bentuk konsentrasi pasar digital, ketimpangan kemampuan antarnegeri dan antarkelompok sosial, fragmentasi aturan perdagangan digital, tekanan terhadap pekerjaan menengah, dan kerentanan ekologis dari ekspansi ekonomi digital. UNCTAD menunjukkan bahwa ekonomi digital tumbuh 10–12% per tahun dan diperkirakan menghasilkan lebih dari dua pertiga nilai tambah baru dalam dekade mendatang, tetapi investasi digital sangat terkonsentrasi: antara 2020 dan 2024, hampir 80% investasi greenfield digital di negara berkembang terkonsentrasi pada 10 negara. World Bank juga menunjukkan bahwa hampir 90% perdagangan dunia kini dipengaruhi oleh *nontariff measures* yang sebagian besar berkaitan dengan standar, sehingga akses pasar masa depan makin ditentukan oleh kapasitas institusional, bukan hanya oleh kemampuan produksi. ([UNCTAD Investment Policy Hub](#))

Makalah ini menyimpulkan bahwa Globalisasi 2.0 tidak dengan sendirinya merupakan peluang emas maupun ancaman baru. Ia adalah arena kontestasi baru. Arah akhirnya ditentukan oleh kualitas kebijakan publik, kemampuan negara membangun fondasi digital dan sosial, reformasi jasa, tata kelola data, standardisasi, persaingan usaha, reskilling tenaga kerja, dan strategi pembangunan yang mampu mengubah keterhubungan global menjadi pembelajaran nasional. Bila faktor-faktor itu dikelola dengan baik, Globalisasi 2.0 dapat menjadi jalan bagi pertumbuhan yang lebih produktif dan lebih inklusif. Bila tidak, ia cenderung memperdalam ketergantungan, konsentrasi, dan ketimpangan yang sudah ada. ([World Bank](#))

Kata Kunci

Globalisasi 2.0, ekonomi global, perdagangan digital, kecerdasan buatan, data lintas batas, ketimpangan, standar internasional, pembangunan ekonomi

Globalisasi 2.0: Peluang Emas atau Ancaman Baru?

Pendahuluan

Istilah “Globalisasi 2.0” dalam makalah ini digunakan sebagai istilah analitis untuk menyebut fase baru globalisasi yang lahir dari pertemuan antara digitalisasi, AI, jasa lintas batas, standardisasi, dan kebangkitan kembali kebijakan industri serta keamanan ekonomi. Ia bukan istilah resmi satu lembaga tertentu, melainkan cara konseptual untuk menandai bahwa globalisasi saat ini tidak lagi bekerja dengan logika yang sepenuhnya sama seperti pada 1990-an atau awal 2000-an. Jika dulu integrasi ekonomi terutama dibaca melalui ekspor barang, relokasi pabrik, dan liberalisasi tarif, kini pusat gravitasi ekonomi dunia makin bergeser ke jasa, data, cloud, chip, platform, dan aturan-aturan teknis yang jauh lebih kompleks. Pergeseran ini tampak pada besarnya perdagangan jasa dan digital services, pada melonjaknya barang pendukung AI, serta pada tumbuhnya peran standar dan kebijakan domestik dalam menentukan akses pasar. ([World Trade Organization](#))

Perubahan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. IMF menegaskan bahwa pertumbuhan global 2026–2027 tetap bertahan terutama karena investasi teknologi, dukungan kebijakan, dan kemampuan adaptasi sektor swasta, meskipun terdapat trade policy headwinds dan ketidakpastian geopolitik. Sementara itu, UNCTAD menilai pertumbuhan global akan tetap lemah di

sekitar 2,6% pada 2026, dengan negara-negara berkembang menghadapi pelemahan permintaan, tekanan fiskal, dan perlunya membangun diversifikasi yang lebih kuat. Artinya, Globalisasi 2.0 lahir bukan pada masa optimisme liberal tanpa gangguan, tetapi pada masa ketika ekonomi dunia justru bergerak di antara keterhubungan yang tinggi dan ketidakpastian yang sama tinggi. ([IMF](#))

Itulah sebabnya pertanyaan “peluang emas atau ancaman baru?” menjadi sangat relevan. Dari satu sisi, globalisasi yang berbasis data dan jasa digital menjanjikan demokratisasi akses. Seorang pengembang perangkat lunak, desainer, konsultan, dosen, atau pelaku UMKM digital kini dapat masuk ke pasar global dengan hambatan yang lebih rendah daripada era ketika partisipasi global terutama dimediasi oleh pabrik besar dan kontainer. OECD secara eksplisit menyebut bahwa transformasi digital menurunkan biaya partisipasi dalam perdagangan internasional dan memperluas siapa yang dapat ikut serta. Dari sisi ini, Globalisasi 2.0 tampak seperti peluang emas. ([OECD](#))

Namun dari sisi lain, globalisasi baru justru memperkuat aktor yang sudah memiliki data besar, cloud, komputasi, infrastruktur digital, dan kemampuan menetapkan standar. UNCTAD menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi digital sangat terkonsentrasi, sementara World Bank menunjukkan bahwa hampir 90% perdagangan dunia kini dipengaruhi oleh *nontariff measures* yang banyak terkait standar. Ini berarti bahwa keterhubungan global modern tampak lebih terbuka secara teknis, tetapi pada saat yang sama bisa lebih eksklusif secara substantif. Siapa yang tidak punya kapasitas digital, kualitas institusi, dan kemampuan memenuhi standar akan tetap tertinggal meskipun koneksi internetnya tersedia. Dari sisi ini, Globalisasi 2.0 tampak sebagai ancaman baru. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Makalah ini ingin menimbang dua sisi tersebut secara akademik dan naratif. Pembahasan akan bergerak dari pemahaman konseptual tentang

Globalisasi 2.0, ke peluang yang dibawanya, lalu ke ancaman struktural yang menyertainya, dan akhirnya ke agenda kebijakan yang dapat menentukan ke mana arah perubahan ini akan dibawa. Dengan pendekatan itu, makalah ini menegaskan bahwa Globalisasi 2.0 bukanlah takdir. Ia adalah arena ekonomi politik yang hasilnya sangat bergantung pada siapa yang menguasai teknologi, siapa yang menetapkan aturan, siapa yang memperoleh keterampilan, dan bagaimana negara menghubungkan keterbukaan global dengan pembangunan domestik. ([World Bank](#))

1. Memahami Globalisasi 2.0

Untuk memahami Globalisasi 2.0, pertama-tama perlu dibedakan dari globalisasi konvensional. Globalisasi konvensional dibangun di atas logika efisiensi biaya: produksi dipindah ke lokasi upah rendah, barang diperdagangkan dalam volume besar, dan pertumbuhan didorong oleh integrasi rantai pasok manufaktur. Struktur itu belum hilang, tetapi kini tidak lagi dominan sendiri. WTO melaporkan bahwa nilai perdagangan barang tetap sangat besar, tetapi perdagangan jasa dan jasa digital tumbuh makin penting, sementara WTO juga menunjukkan bahwa barang-barang pendukung AI menjadi motor utama pertumbuhan perdagangan 2025. Ini berarti lapisan baru nilai tambah kini berada pada software, komputasi, data, lisensi, cloud, logistik cerdas, dan layanan bisnis, bukan hanya pada barang akhir. ([World Trade Organization](#))

OECD memberikan penjelasan yang memperjelas transformasi ini. Menurut OECD, teknologi digital mengubah tiga hal sekaligus: apa yang diperdagangkan, bagaimana perdagangan dilakukan, dan siapa yang dapat ikut serta. Pada ekonomi lama, partisipasi global lebih bergantung pada infrastruktur fisik, modal besar, dan kapasitas produksi massal. Pada ekonomi baru, partisipasi dapat terjadi melalui layanan profesional, pendidikan digital, software, pekerjaan lepas berbasis platform, dan banyak bentuk jasa lain yang dapat dilakukan lintas batas. Globalisasi 2.0, karena

itu, dapat dipahami sebagai globalisasi yang lebih “terjaring” oleh informasi dan layanan daripada oleh kontainer semata. ([OECD](#))

Tetapi Globalisasi 2.0 bukan sekadar “globalisasi plus internet”. Ada unsur baru yang sangat menentukan, yaitu standardisasi, regulasi data, komputasi, dan keamanan ekonomi. World Bank menunjukkan bahwa standar telah menjadi infrastruktur tersembunyi ekonomi modern, dan hampir 90% perdagangan dunia kini dipengaruhi oleh *nontariff measures* yang terutama terkait dengan standar. Ini berarti bahwa globalisasi kontemporer berjalan bukan hanya lewat keterbukaan pasar, tetapi juga lewat arsitektur aturan, pengujian, akreditasi, interoperabilitas, dan keamanan. Negara atau perusahaan yang gagal memahami arsitektur itu akan sulit memanfaatkan peluang global secara penuh. ([World Bank](#))

Globalisasi 2.0 juga ditandai oleh kembalinya negara ke pusat strategi ekonomi. Jika globalisasi lama sering dihubungkan dengan narasi penyusutan peran negara, maka globalisasi baru justru dibentuk oleh industrial policy, screening investasi, data governance, kebijakan chip, dan perlombaan membangun fondasi AI. Bahkan di WTO sendiri, dinamika terbaru menunjukkan gejala ini. Pada Maret 2026, para anggota WTO gagal mencapai konsensus penuh untuk memperpanjang moratorium global atas bea untuk transmisi elektronik, dan awal April 2026 sekelompok 23 anggota memilih membuat pengaturan tersendiri untuk tetap tidak mengenakan bea satu sama lain. Selain itu, 66 anggota WTO menyepakati aturan dasar perdagangan digital secara plurilateral, bukan melalui konsensus penuh 166 anggota. Ini menunjukkan bahwa Globalisasi 2.0 bukan hanya lebih digital, tetapi juga lebih terfragmentasi dan lebih plurilateral. ([Reuters](#))

Karena itu, secara konseptual, Globalisasi 2.0 dapat dipahami sebagai fase ketika integrasi ekonomi global semakin bersandar pada jasa, data, dan teknologi, tetapi pada saat yang sama semakin dibentuk oleh aturan, standar, dan strategi negara. Inilah yang membuatnya berbeda. Ia tidak

sesederhana globalisasi lama, dan justru karena lebih kompleks, ia menawarkan peluang yang lebih beragam sekaligus ancaman yang lebih halus dan dalam. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

2. Mengapa Globalisasi 2.0 Dapat Menjadi Peluang Emas

Peluang emas pertama dari Globalisasi 2.0 terletak pada meluasnya sumber pertumbuhan ekonomi. WTO menunjukkan bahwa perdagangan jasa dunia sudah sangat besar dan jasa yang disampaikan secara digital tumbuh pesat. Ini berarti ekonomi global tidak lagi semata bergantung pada industri manufaktur tradisional. Negara, kota, dan perusahaan yang mungkin tidak memiliki basis industri berat kini tetap dapat membangun keunggulan melalui software, pendidikan digital, layanan kesehatan digital, fintech, konsultasi, desain, dan berbagai jasa profesional lainnya. Perubahan ini memperluas jalur pertumbuhan dan membuka kemungkinan bagi lebih banyak aktor untuk ikut masuk ke pasar global. ([World Trade Organization](#))

Peluang emas kedua terletak pada penurunan biaya partisipasi lintas batas. OECD menegaskan bahwa teknologi digital telah menurunkan biaya untuk berdagang, berkomunikasi, dan berkoordinasi secara internasional. Artinya, perusahaan kecil, pekerja lepas profesional, universitas, lembaga riset, bahkan komunitas kreatif dapat mengakses pelanggan, murid, klien, atau mitra kerja di luar negeri tanpa harus memiliki infrastruktur fisik sebesar perusahaan multinasional lama. Dalam dunia seperti ini, Globalisasi 2.0 berpotensi mendemokratisasi akses pasar. Ia membuka jalan agar partisipasi global tidak hanya dimiliki oleh aktor besar, tetapi juga oleh aktor yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, meskipun modal fisiknya terbatas. ([OECD](#))

Peluang emas ketiga adalah produktivitas. WTO dalam *World Trade Report 2025* menilai bahwa AI dapat menurunkan biaya perdagangan, mempercepat logistik, memperbaiki pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi lintas sektor. World Bank menyebut AI sebagai

kekuatan yang dapat membuka pasar baru, meningkatkan akses terhadap pengetahuan, dan mendorong transformasi ekonomi. Dalam konteks ini, negara berkembang tidak harus selalu meniru jalur industrialisasi lama untuk meningkatkan produktivitas. Dengan fondasi digital, data, dan kompetensi yang memadai, beberapa tahap pertumbuhan dapat “dilompati”. Ini menjadikan Globalisasi 2.0 sebagai peluang emas untuk *leapfrogging*, meskipun tentu tidak otomatis dan tidak mudah. ([World Bank](#))

Peluang emas keempat berkaitan dengan investasi baru. UNCTAD menyebut ekonomi digital sebagai salah satu mesin paling kuat pertumbuhan global, dengan laju 10–12% per tahun dan prospek menjadi lebih dari dua pertiga sumber nilai tambah baru dalam dekade mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa dunia sedang masuk ke fase di mana modal, pengetahuan, dan jaringan bisnis semakin mengalir ke aktivitas digital. Negara yang memiliki strategi yang tepat dapat menggunakan arus ini untuk membangun sektor-sektor baru, memperluas lapangan kerja berbasis keterampilan, dan menaikkan posisi dalam rantai nilai. Di sinilah Globalisasi 2.0 bisa menjadi peluang emas pembangunan, terutama bila negara tidak hanya menunggu investasi datang, tetapi aktif membangun daya tarik kelembagaan dan fondasi domestiknya. ([UNCTAD Investment Policy Hub](#))

Peluang emas kelima adalah kaitan antara digitalisasi dan keberlanjutan. IEA menunjukkan bahwa investasi energi global makin condong ke energi bersih, jaringan, penyimpanan, efisiensi, dan elektrifikasi, dengan aliran ke sektor-sektor ini sekitar dua kali lipat dari investasi ke minyak, gas, dan batu bara pada 2025. Ini berarti ekonomi masa depan tidak hanya lebih digital, tetapi juga cenderung lebih rendah emisi. Globalisasi 2.0 dapat membuka jalan bagi negara untuk masuk ke perdagangan dan investasi yang terkait dengan energi bersih, manajemen jaringan, efisiensi industri, dan layanan digital untuk transisi hijau. Bagi negara yang mampu

memadukan transformasi digital dan transisi hijau, peluang ekonominya sangat besar. ([IEA](#))

3. Mengapa Globalisasi 2.0 Juga Bisa Menjadi Ancaman Baru

Meski potensinya besar, ancaman pertama Globalisasi 2.0 adalah konsentrasi nilai tambah. UNCTAD menunjukkan bahwa investasi digital sangat tidak merata. Antara 2020 dan 2024, hampir 80% investasi greenfield digital di negara berkembang terkonsentrasi pada 10 negara. Ini berarti bahwa meskipun ekonomi digital tumbuh pesat, manfaat utamanya tidak tersebar secara otomatis ke seluruh Global South. Dalam praktiknya, negara yang lebih dahulu memiliki infrastruktur digital, kapasitas komputasi, regulasi yang relatif matang, dan pasar yang menarik akan menyerap lebih banyak investasi dan memperlebar jarak dari negara yang tertinggal. Dengan kata lain, Globalisasi 2.0 berisiko menghasilkan *winners' club* baru. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Ancaman kedua adalah konsentrasi pasar digital. UNCTAD menegaskan bahwa pasar digital semakin terkonsentrasi dan tindakan pemerintah untuk memulihkan persaingan meningkat tajam. Penyebabnya bukan hanya perilaku perusahaan, tetapi juga sifat ekonomi digital itu sendiri: biaya marjinal rendah, efek jaringan kuat, dan akumulasi data yang memperkuat posisi incumbents. Begitu sebuah platform berhasil mencapai skala besar, ia dapat melayani pengguna tambahan dengan biaya rendah sambil terus memperkaya basis datanya. Ini membuat pendatang baru sulit menyaingi pemain lama. Akibatnya, Globalisasi 2.0 bisa melahirkan pasar yang tampak terbuka, tetapi sesungguhnya sangat terkunci. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Ancaman ketiga adalah polarisasi pasar kerja. WEF memperkirakan adanya 170 juta pekerjaan baru sampai 2030, tetapi juga 92 juta pekerjaan tergeser. IMF menambahkan bahwa lowongan yang menuntut keterampilan AI dan IT memberi upah lebih tinggi, tetapi juga memperdalam polarisasi dan mengecilkan kelas menengah. ILO

menegaskan bahwa satu dari empat pekerjaan di dunia memiliki beberapa derajat paparan terhadap GenAI, sehingga perubahan besar akan terjadi pada isi pekerjaan, terutama di sektor-sektor administratif dan clerical. Ini berarti bahwa Globalisasi 2.0 dapat meningkatkan produktivitas total, tetapi juga memecah pasar kerja antara mereka yang komplementer terhadap teknologi dan mereka yang lebih mudah tergantikan olehnya. ([World Economic Forum Reports](#))

Ancaman keempat adalah fragmentasi aturan. Perkembangan WTO terbaru memperlihatkan bahwa bahkan pada isu perdagangan digital, konsensus global semakin sulit dicapai. Moratorium bea atas transmisi elektronik berakhir tanpa perpanjangan multilateral penuh, sementara sekelompok negara memilih membuat pengaturan antar-mereka sendiri. Pada saat yang sama, 66 anggota WTO melangkah dengan aturan dasar perdagangan digital secara plurilateral. Kondisi ini menunjukkan bahwa Globalisasi 2.0 tidak selalu bergerak menuju tata aturan global yang lebih seragam; ia bisa bergerak menuju blok-blok aturan yang bertumpuk dan saling tumpang tindih. Bagi negara kecil atau kurang siap, fragmentasi ini menambah biaya kepatuhan dan risiko kebijakan. ([Reuters](#))

Ancaman kelima adalah jejak ekologis digitalisasi. UNCTAD dalam *Digital Economy Report 2024* mengingatkan bahwa ekonomi digital yang tumbuh pesat memiliki jejak material dan energi yang semakin besar, termasuk konsumsi listrik dan air dari data center, kebutuhan bahan mentah untuk perangkat, serta persoalan limbah elektronik. Artinya, digitalisasi tidak otomatis hijau. Bila dunia hanya mengejar ekspansi data center, AI, perangkat, dan konektivitas tanpa mengaitkannya dengan energi bersih dan tata kelola limbah, maka Globalisasi 2.0 dapat menjadi ancaman ekologis baru. Ancaman ini penting karena sering tersembunyi di balik narasi bahwa ekonomi digital selalu lebih ringan daripada ekonomi industri. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

4. Perspektif Ekonomi Politik: Siapa yang Menang, Siapa yang Tertinggal?

Dari sudut ekonomi politik, pertanyaan tentang Globalisasi 2.0 tidak dapat dijawab hanya dengan melihat data pertumbuhan. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang menguasai data, cloud, komputasi, platform, dan standar. WTO menegaskan bahwa AI dapat mendorong perdagangan dan produktivitas, tetapi juga mengubah distribusi pendapatan dan kekayaan di dalam dan antarnegara. Ini berarti bahwa teknologi baru tidak netral. Ia bekerja di dalam struktur kekuasaan yang sudah ada, dan sering kali memperkuat aktor yang memiliki posisi awal lebih kuat. ([World Trade Organization](#))

World Bank memberi sudut pandang penting melalui konsep *adapt-align-author* pada standarisasi. Negara pada tahap awal perlu menyesuaikan standar internasional dengan kondisi lokal, pada tahap berikutnya menyelaraskan pasar domestik dengan standar global, dan pada tahap lebih maju ikut membentuk standar internasional di bidang prioritas. Kerangka ini memperlihatkan bahwa kekuasaan ekonomi global tidak hanya ada pada kepemilikan pabrik atau modal, tetapi juga pada kemampuan menulis aturan. Negara yang hanya menerima standar akan selalu reaktif. Negara yang ikut menyusun standar dapat mengubah keterhubungan global menjadi keunggulan strategis. Dalam ekonomi politik Globalisasi 2.0, kemampuan memengaruhi standar sama pentingnya dengan kemampuan mengekspor. ([World Bank](#))

OECD menegaskan bahwa arus data lintas batas sangat penting bagi ekonomi global, tetapi juga memperkuat tantangan seputar privasi, keamanan digital, persaingan, dan industrial policy. Dengan kata lain, data bukan sekadar input ekonomi; data adalah sumber kekuasaan. Pihak yang menguasai data dalam jumlah besar memiliki keunggulan dalam melatih model AI, mempersonalisasi layanan, mengunci pengguna, dan memperluas dominasi pasar. Inilah yang membuat Globalisasi 2.0 sangat

politis: pertarungan ekonomi masa depan bukan hanya soal siapa yang berdagang, tetapi siapa yang memegang data dan siapa yang mengatur alirannya. ([OECD](#))

UNCTAD juga menunjukkan bahwa banyak strategi digital nasional di negara berkembang masih berjalan dalam silo dan belum terhubung secara kuat dengan strategi investasi atau keberlanjutan. Ini berarti banyak negara masuk ke Globalisasi 2.0 tanpa strategi politik-ekonomi yang koheren. Hasilnya mudah diduga: masyarakat menjadi pengguna teknologi, tetapi negara tidak membangun kapasitas domestik yang cukup untuk menangkap nilai tambah. Dari sudut ini, ancaman Globalisasi 2.0 bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari kelemahan strategi pembangunan di dalam negeri sendiri. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

5. Pekerjaan Masa Depan: Demokratisasi Peluang atau Polarisasi Keterampilan?

Salah satu janji utama Globalisasi 2.0 adalah perluasan peluang kerja berbasis pengetahuan. Karena jasa digital dan kerja jarak jauh tumbuh, banyak orang kini dapat mengakses pasar internasional tanpa migrasi fisik. Secara teori, ini adalah bentuk demokratisasi peluang. Seorang penerjemah, analis, dosen, pengembang, atau desainer di satu negara dapat menjual jasanya ke negara lain dengan biaya transaksi yang lebih rendah dibanding masa lalu. OECD menyebut bahwa teknologi digital memperluas siapa yang dapat ikut dalam perdagangan. Dari sudut ini, masa depan kerja tampak lebih terbuka. ([OECD](#))

Tetapi data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa gambaran itu harus dibaca hati-hati. WEF memperkirakan 39% keterampilan inti akan berubah, dan ILO menegaskan bahwa GenAI lebih mungkin mentransformasi pekerjaan daripada menghapusnya. Masalahnya adalah transformasi itu menuntut kemampuan yang tidak merata. Pekerja dengan pendidikan lebih tinggi, literasi teknologi lebih baik, akses perangkat memadai, dan

lingkungan kerja yang mendukung akan lebih mudah beradaptasi. Pekerja yang tidak memiliki keempat hal itu cenderung lebih rentan. Dengan demikian, Globalisasi 2.0 dapat memperluas pasar kerja, tetapi juga memperkeras segmentasi internalnya. ([World Economic Forum Reports](#))

IMF memperlihatkan bahwa keterampilan baru, terutama AI dan IT, berkaitan dengan upah yang lebih tinggi. Namun keuntungan itu terutama dinikmati oleh pekerja terampil. IMF juga menilai bahwa difusi keterampilan baru dapat memperdalam polarisasi dan menyusutkan kelas menengah. Ini berarti pertumbuhan lapangan kerja baru tidak identik dengan pertumbuhan kelas menengah baru. Tanpa reskilling besar-besaran, yang kemungkinan tumbuh justru adalah pekerjaan berupah tinggi untuk segmen terampil dan pekerjaan berupah rendah yang sulit diotomasi, sementara pekerjaan rutin kelas menengah tertekan. ([Open Knowledge Repository](#))

Karena itu, jawaban atas pertanyaan apakah masa depan kerja akan inklusif atau timpang bergantung pada kualitas transisi. Bila negara dan perusahaan menganggap pekerja hanya perlu “menyesuaikan diri sendiri”, maka hasil yang paling mungkin adalah polarisasi. Bila reskilling, pendidikan seumur hidup, sertifikasi ulang, dan perlindungan transisi diperkuat, maka peluang demokratisasi kerja digital lebih mungkin terjadi. Dalam hal ini, pasar kerja masa depan bukan ditentukan oleh teknologi saja, melainkan oleh pilihan kebijakan dan institusi yang mengelilinginya. ([International Labour Organization](#))

6. Globalisasi 2.0 dan Negara Berkembang: Jalan Pintas atau Jebakan Baru?

Bagi negara berkembang, Globalisasi 2.0 sering tampak menjanjikan karena membuka kemungkinan *leapfrogging*. Negara yang tertinggal dalam manufaktur berat mungkin dapat langsung membangun jasa digital, fintech, pendidikan daring, e-commerce, atau layanan profesional lintas batas. OECD menegaskan bahwa digital trade memungkinkan partisipasi

lintas batas dengan biaya lebih rendah. Dari perspektif ini, globalisasi baru tampak lebih bersahabat bagi negara yang tidak memiliki basis industri konvensional sekuat negara maju. ([OECD](#))

Namun UNCTAD menunjukkan bahwa investasi digital sangat terkonsentrasi, dan sebagian besar negara berkembang belum memiliki infrastruktur, tata kelola, dan strategi investasi digital yang cukup kuat. Bahkan ketika investasi masuk, ia kerap terpusat pada sedikit negara dan sedikit kawasan di dalam negara tersebut. Risiko utamanya adalah "keterhubungan tanpa kapabilitas": masyarakat menjadi semakin online, tetapi ekonomi domestik tidak naik kelas secara berarti. Dalam situasi seperti ini, Globalisasi 2.0 justru berubah dari jalan pintas menjadi jebakan baru. Negara berkembang terhubung, tetapi tetap berada di pinggir penciptaan nilai. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

World Bank melalui laporan *Digital Progress and Trends 2025* menekankan bahwa banyak negara berpendapatan rendah dan menengah menghadapi tantangan besar pada konektivitas, komputasi, data, dan kompetensi. Ini penting karena menunjukkan bahwa digital gap masa kini bukan lagi sekadar soal internet atau tidak internet, tetapi soal kualitas infrastruktur, akses ke komputasi, availability data, dan kapasitas manusia untuk memakai semuanya. Negara berkembang yang tidak mengejar empat fondasi ini akan tetap menjadi pengguna layanan global, bukan pembentuk nilai tambah. ([World Bank](#))

Maka, bagi negara berkembang, Globalisasi 2.0 hanya menjadi peluang emas bila keterbukaan dihubungkan dengan pembangunan kapabilitas nasional. Ini berarti investasi pada infrastruktur digital, reformasi jasa, pendidikan, kualitas institusi, standar, dan kebijakan persaingan. Tanpa itu, globalisasi baru hanya akan mempercepat arus konsumsi digital dari luar, bukan pembentukan kapasitas ekonomi dari dalam. ([World Bank](#))

7. Agenda Kebijakan: Bagaimana Mengubah Peluang Menjadi Hasil

Agenda pertama adalah membangun fondasi digital secara serius. World Bank menekankan empat fondasi AI: konektivitas, komputasi, konteks data, dan kompetensi. Tanpa keempatnya, negara tidak akan mampu menggunakan AI dan globalisasi digital untuk meningkatkan produktivitas secara luas. Investasi pada broadband, cloud, energi andal, pusat data, dan infrastruktur keamanan siber harus diperlakukan sebagai investasi strategis, bukan sekadar proyek teknologi. ([World Bank](#))

Agenda kedua adalah reformasi jasa dan tata kelola data. OECD memperingatkan bahwa hambatan perdagangan jasa tetap tinggi pada 2025 dan menghambat potensi pertumbuhan layanan yang digerakkan AI. Dalam ekonomi baru, jasa modern—logistik, pembayaran, layanan profesional, cloud, komunikasi, pendidikan, kesehatan digital—merupakan saraf produktivitas lintas sektor. Negara yang tidak memodernisasi regulasi jasa akan tertinggal meskipun konektivitas internetnya membaik. Pada saat yang sama, kebijakan data harus mendorong *data flows with trust*, bukan keterbukaan total tanpa perlindungan dan bukan pula penutupan total yang membunuh inovasi. ([OECD](#))

Agenda ketiga adalah menjaga persaingan. UNCTAD menunjukkan bahwa konsentrasi di pasar digital telah memicu lonjakan tindakan pemerintah. Ini mengingatkan bahwa ekonomi digital memerlukan kebijakan persaingan yang diperbarui. Tanpa pengawasan terhadap integrasi vertikal, penguasaan data, self-preferencing platform, dan akuisisi predatoris, Globalisasi 2.0 akan lebih mudah berubah menjadi oligarki digital. Persaingan yang sehat bukan hambatan bagi inovasi; ia justru syarat agar inovasi tidak terkunci pada segelintir pemain. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Agenda keempat adalah memperlakukan keterampilan sebagai infrastruktur ekonomi. WEF, IMF, dan ILO sama-sama menunjukkan bahwa kebutuhan keterampilan berubah sangat cepat. Karena itu, sistem pendidikan formal saja tidak cukup. Diperlukan ekosistem pembelajaran

sepanjang hayat yang menghubungkan sekolah, universitas, pelatihan profesional, sertifikasi, dan perusahaan. Bila tidak, teknologi akan tersedia, tetapi pasar kerja tidak mampu menyerap manfaatnya secara merata.

([World Economic Forum Reports](#))

Agenda kelima adalah menghubungkan Globalisasi 2.0 dengan keberlanjutan. IEA menunjukkan bahwa investasi global kini mengalir besar ke energi bersih, jaringan, penyimpanan, dan efisiensi. Ini berarti ekonomi masa depan yang cerdas harus menyatukan digitalisasi dan transisi hijau, bukan memisahkannya. Jika negara mampu membangun layanan digital untuk efisiensi energi, logistik rendah emisi, smart grid, dan industri rendah karbon, maka Globalisasi 2.0 akan lebih mungkin menjadi peluang emas yang berkelanjutan. Jika tidak, ia hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang rapuh secara ekologis. ([IEA](#))

Kesimpulan

Globalisasi 2.0 pada dasarnya adalah bentuk baru dari keterhubungan global yang lebih banyak dimediasi oleh jasa, data, komputasi, standar, dan AI. Dalam bentuk ini, ekonomi dunia tetap terbuka, tetapi tidak lagi bergerak terutama dengan logika lama. Nilai tambah bergeser, pemain baru masuk, namun sekaligus kekuasaan ekonomi makin terkonsentrasi pada mereka yang menguasai cloud, chip, data, standard-setting, dan ekosistem digital. Karena itu, pertanyaan “peluang emas atau ancaman baru?” adalah pertanyaan yang sah dan mendasar. ([World Trade Organization](#))

Dari sisi peluang, Globalisasi 2.0 memungkinkan perluasan jasa lintas batas, partisipasi UMKM dan pekerja profesional, peningkatan produktivitas melalui AI, serta koneksi yang lebih kuat antara digitalisasi dan transisi hijau. Dari sisi ancaman, ia dapat memperdalam konsentrasi pasar, memperlebar ketimpangan kemampuan, memecah aturan perdagangan digital, menekan pekerjaan menengah, dan menambah jejak ekologis

digitalisasi. Singkatnya, peluangnya nyata, tetapi begitu pula risikonya.

([OECD](#))

Karena itu, jawaban paling jujur atas judul makalah ini adalah: Globalisasi 2.0 bisa menjadi peluang emas hanya bila dikelola secara sadar, dan akan menjadi ancaman baru bila dibiarkan berjalan hanya menurut logika konsentrasi pasar dan ketimpangan awal. Arah akhirnya tidak ditentukan oleh teknologi semata, tetapi oleh politik pembangunan, kualitas negara, keberanian reformasi, dan kemampuan menghubungkan keterbukaan global dengan kapabilitas domestik. Di situlah letak inti persoalannya: masa depan ekonomi bukan hanya tentang seberapa cepat dunia berubah, tetapi tentang siapa yang berhasil mengarahkan perubahan itu. ([World Bank](#))

Glosarium

Globalisasi 2.0: istilah analitis untuk menggambarkan fase baru globalisasi yang semakin ditopang oleh jasa, data, AI, standardisasi, dan platform digital, serta lebih dipengaruhi oleh strategi negara dan fragmentasi aturan. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Digital trade: perdagangan yang dipesan, difasilitasi, atau dikirim melalui sarana digital, termasuk jasa digital dan transaksi berbasis platform. ([OECD](#))

Arus data lintas batas: perpindahan data antarnegara yang menopang perdagangan digital, logistik, komunikasi, dan operasi bisnis global. ([OECD](#))

Data Free Flow with Trust (DFFT): pendekatan yang mendorong arus data lintas batas sambil memastikan perlindungan terhadap privasi, keamanan, dan hak kekayaan intelektual. ([OECD](#))

AI-enabling goods: barang fisik yang menopang pengembangan dan penggunaan AI, seperti chip, semikonduktor, server, dan perangkat transmisi data. ([World Trade Organization](#))

Nontariff measures: kebijakan non-tarif seperti sertifikasi, pelabelan, pengujian, standar teknis, dan aturan keamanan yang memengaruhi akses pasar. ([World Bank](#))

Quality infrastructure: sistem pengujian, akreditasi, sertifikasi, dan metrologi yang memungkinkan standar diterapkan secara efektif dan terpercaya. ([World Bank](#))

Polarisasi pasar kerja: kondisi ketika pekerjaan berketerampilan tinggi dan pekerjaan berupah rendah tumbuh, sementara pekerjaan kelas menengah rutin menyusut atau tertekan. ([World Economic Forum Reports](#))

Plurilateral digital trade rules: aturan perdagangan digital yang disepakati oleh sekelompok anggota WTO, bukan seluruh anggota, sehingga berlaku terbatas pada pihak yang bergabung. ([Reuters](#))

Ketimpangan kemampuan: kesenjangan bukan hanya pada pendapatan, tetapi pada akses terhadap keterampilan, data, komputasi, infrastruktur digital, dan kapasitas institusional yang menentukan kemampuan menangkap manfaat ekonomi digital. ([World Bank](#))

Referensi (APA 7)

International Energy Agency. (2025). *World energy investment 2025*. IEA.

International Labour Organization. (2025). *Generative AI and jobs: A 2025 update*. ILO.

International Labour Organization. (2025). *Generative AI and jobs: A refined global index of occupational exposure* (Working Paper No. 140). ILO.

International Monetary Fund. (2026). *World economic outlook update, January 2026: Global economy—Steady amid divergent forces*. IMF.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). *Cross-border data flows*. OECD.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). *Data free flow with trust*. OECD.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). *Digital trade*. OECD.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). *OECD Services Trade Restrictiveness Index 2026*. OECD.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). *The OECD Going Digital Integrated Policy Framework 2026*. OECD.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026, March 13). *Services trade restrictions stayed high in 2025: Why removing hidden hurdles matters*. OECD.

United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *Digital economy report 2024: Shaping an environmentally sustainable and inclusive digital future*. UNCTAD.

United Nations Conference on Trade and Development. (2025). *World investment report 2025: International investment in the digital economy*. UNCTAD.

United Nations Conference on Trade and Development. (2026). *Global trade update (January 2026): Top trends redefining global trade in 2026*. UNCTAD.

United Nations Conference on Trade and Development. (2026).

International investment in the digital economy: A toolkit for policymakers. UNCTAD.

World Bank. (2024). *Poverty, prosperity, and planet report 2024: Pathways out of the polycrisis.* World Bank.

World Bank. (2025). *Digital progress and trends report 2025: Strengthening AI foundations.* World Bank.

World Bank. (2025). *World development report 2025: Standards for development.* World Bank.

World Economic Forum. (2025). *The future of jobs report 2025.* World Economic Forum.

World Trade Organization. (2025). *World trade report 2025: Making trade and AI work together to the benefit of all.* WTO.

World Trade Organization. (2026). *Global trade outlook and statistics, March 2026.* WTO.

Reuters. (2026, March 28). *What is the World Trade Organization e-commerce moratorium?*

Reuters. (2026, March 28). *WTO members bypass opposition to introduce world's first baseline digital trade rules.*

Reuters. (2026, March 30). *E-commerce duties moratorium expires as WTO talks run out of time, officials say.*

Reuters. (2026, April 2). *Group of WTO states agrees not to impose e-commerce duties.*

Bapak bisa kirim judul berikutnya, dan saya lanjutkan dengan format makalah yang sama.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 3 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69cdc32d-d5b0-83a0-ae1d-b7874e2a6389>